



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI RISWANTI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 83688

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

1.107.000.000

1. Tanah Seluas 277 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. Tanah Seluas 235 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/210 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 405.000.000
4. Tanah Seluas 339 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 240 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

142.500.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, KIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

61.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

628.243.866

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

1.938.743.866

III. HUTANG

Rp.



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.938.743.866

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.